

Rancangan naskah
Catatan kaki akan menyusul

BAHASA INDONESIA DALAM PERJUANGAN BANGSA

Soedjatmoko

75

Pandangan-pandangan yang dikemukakan di dalam naskah ini merupakan pandangan-pandangan pribadi sipengarang, dan tidak ada hubungan langsung dengan pandangan atau kebijaksanaan resmi BAPPENAS.

BAHASA INDONESIA DALAM PERJUANGAN BANGSA

Kalau kita menoleh kebelakang kepada kurun sejarah yang mulai dengan peristiwa Sumpah Pemuda sampai kepada tahun 1978 ini, jelas sekali-lah betapa sulitnya untuk mensarikan daripadanya perubahan-perubahan sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dan yang perlu diperhitungkan dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia seterusnya. Hal ini disebabkan karena padatnya dan silih bergantinya kejadian-kejadian yang telah memberi arah dan bentuk kepada kehidupan politik dan ekonomi kita dengan segala gejolaknya sendiri. Lebih sulit lagi untuk memaksakan semuanya itu kedalam batas-batas suatu kertas kerja. Usaha sintesis yang diperlukan untuk itu tidak bisa lain dari bersifat subjektif dan impressionistis.

I

Sumpah Pemuda dilakukan di dalam suatu keadaan ekonomi Hindia Belanda yang baru mulai berkembang kembali setelah suatu depresi agraris panjang melanda seluruh dunia dalam seperempat terakhir abad ke 19, dan beberapa tahun sebelum mulainya depresi baru pada tahun 1929, yang juga meliputi seluruh dunia, namun sekali ini mengenai hampir semua bidang ekonomi. Dari tahun 1933 sampai tahun 1942 pemerintah Belanda mencoba memulihkan kembali ekonominya sambil sekaligus mencoba menanggulangi peningkatan kemiskinan yang merajalela didaerah pedesaan. Terhadap latar belakang ekonomi sosial ini, berkembanglah pergerakan nasional kita. Pertumbuhan pergerakan nasional bukan tanpa penderitaan dan kemunduran akibat pukulan-pukulan balasan dari pemerintah Hindia Belanda yang khususnya mengenai gerakan komunis, Islam dan nasionalisme yang dianggapnya radikal. Jaman pendudukan militer Jepang dengan segala penderitaan, korban manusia

serta penghisapan dan penindasan khususnya didaerah pedesaan, juga telah menyaksikan penyusunan kembali kekuatan gerakan nasional. Karena larangan Jepang untuk memakai bahasa Belanda, bahasa Indonesia mendapat peluang untuk meluas dan berkembang pada masa itu. Kemudian proklamasi kemerdekaan dan revolusi nasional, dan di dalam tahun 50-an berturut-turut Korea Boom dan hancurnya sistim politik generasi pertama. Sampai tahun 1965, kita terlibat dalam beberapa usaha untuk mewujudkan sistim politik lain yang dapat dianggap lebih cocok dengan keperluan revolusi dan sifat-sifat bangsa Indonesia, yang akhirnya membawa kita kembali kepada Undang Undang Dasar 45.

Kemudian telah kita alami hancurnya usaha itu di dalam suatu keadaan ekonomi yang macet samasekali, suatu masa peralihan yang penuh pergolakan dan yang sekali lagi membawa korban manusia yang sangat besar. Sesudah itu mulailah masa Orde Baru dengan usaha pembangunannya.

Pergolakan sejarah yang hebat ini telah berkali-kali membawa kita dari puncak kegemilangan kehidupan bangsa kedalam jurang penghinaan dan ketakutan. Gelombang-gelombang harapan tinggi telah silih berganti dengan masa kegelapan dan kebingungan. Kita telah melihat betapa heroisme bangsa kita telah memupuk dan menyegarkan harga diri kita bersama, dan kita juga telah menyaksikan teladan-teladan kesediaan kita untuk berkorban dan bertahan demi tujuan-tujuan yang mulia. Tetapi kita juga telah mengalami saat-saat yang ditandai kebuasan manusia dan saat-saat yang dikuasai oleh pengejaran kepentingan diri sendiri dan kerakusan yang tidak terkendalikan. Kita telah menikmati kehidupan yang merdeka dan bebas, tapi kita juga telah merasakan pahitnya masa-masa ketidakbebasan, penindasan dan penghisapan, penjara dan pembuangan. Akhirnya kita juga telah menyaksikan betapa rapuh dan sementara segala kekuasaan duniawi dalam naik turunnya serta lika-likunya arus sejarah

yang terus mengalir dengan derasnya. Maka mau tak mau, pengalaman hidup semacam ini dalam waktu dua setengah generasi saja, telah memberikan cap yang khas kepada alam jiwa dan pandangan hidup kita, pada nilai-nilai yang kita pegang dan kepada harapan dan cita yang kita kandung. Begitu juga pada persepsi kita mengenai diri kita sebagai bangsa.

Namun bukan proses sejarah ini sajalah yang menentukan perubahan-perubahan serta keadaan sosial budaya kita. Di bawah dataran gejala-gejala sejarah politik dan ekonomi, terdapat proses-proses perubahan sosial yang secara diam-diam berjalan terus atas dorongan dinamikanya sendiri. Proses-proses ini tidak kurang pengaruhnya atas keadaan kita, bahkan wujud permasalahan dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini, dan lebih lagi di dalam hari depan kita, tapi juga bakal pemecahannya, ditentukan olehnya. Dua proses utama diantaranya ialah, penambahan jumlah penduduk dengan segala akibatnya atas tata susunan sosial dan kehidupan budaya, dan terus meningkatnya kecerdasan hidup dan kesadaran politik bangsa kita, sebagai akibat pendidikan dan komunikasi modern.

Kalau pada tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, jumlah penduduk adalah 60 juta lebih, pada tahun 1976 jumlah itu lebih berlipat ganda menjadi 131 juta lebih. Jikalau pada tahun 1930 jumlah kota yang berpenduduk lebih dari 50.000 jiwa hanya 17, dan jumlah total penduduk dikota lebih kurang 2 juta, pada tahun 1971 dapat dihitung 23 kota yang berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa, dan 13 juta orang yang tinggal dikota. Dalam 15 tahun terakhir pemerintahan Hindia Belanda, jumlah orang Indonesia yang menikmati pendidikan dasar dalam sekolah-sekolah pemerintah dan bersubsidi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa perantara, ialah diantara 65.000 - 80.000, yaitu kurang dari 1% golongan umur yang relevan. Pada tahun

1975, jumlah siswa disekolah Dasar 14 juta lebih. Pada akhir pemerintahan kolonial, kurang dari 7000 orang Indonesia mendapat pendidikan disekolah-sekolah lanjutan berbahasa Belanda. Dalam tahun 1975, jumlahnya disekolah lanjutan lebih dari $2\frac{1}{2}$ juta. Pada permulaan pendudukan Jepang, jumlah orang Indonesia yang telah mendapat pendidikan tingkat sarjana tidak lebih dari 230 orang, sedangkan pada tingkat universitas-universitas, angka-angka untuk mahasiswa dalam tahun 1935 sebesar 984, di dalam tahun 1940 jumlahnya 1.246, dan pada tahun 1975 jumlahnya sebesar 134.500 orang.

Dalam masa 50 tahun memang sangat mendalamlah perubahan wajah serta pola-pola hidup masyarakat kita. Banyak sekali sudah ciri-ciri modern di dalam kehidupan kita sekarang ini yang belum ada 50 tahun yang lalu. Mobilitas penduduk telah sangat meningkat, baik secara vertikal maupun horisontal. Elite kita telah bertambah besar, baik secara absolut maupun secara proporsionil. Kalau dahulu hanya anak dari kaum ningrat bisa maju, - walaupun gereja Protestan dan Katolik ternyata untuk sejumlah kecil anak desa juga membuka jalur alternatif mobilitas keatas - di dalam dan sejak revolusi kita berbagai golongan lain telah masuk kedalam golongan elite, diantaranya golongan-golongan yang tidak berpendidikan Barat, yang muncul dari birokrasi kecil, dan dari gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi politik, buruh dan petani. Dalam hubungan ini perkembangan penting ialah masuknya, dijamin pendudukan Jepang, pemimpin-pemimpin golongan Islam kedalam elite Indonesia, yang di dalam masa kolonial umumnya dijauhkan dari kedudukan-kedudukan formil yang berpengaruh. Pengluasan pendidikan telah membuka jalur-jalur mobilitas ke atas yang jauh lebih banyak serta luas, dibandingkan dengan dahulu.

Perkembangan lalu lintas darat, laut dan udara telah memudahkan mobilitas horisontal. Hal itu telah memungkinkan orang mengejar

peluang-peluang ekonomi, pendidikan, untuk keperluan kedinasan dan pemukiman secara lebih luas dan intensif. Peningkatan mobilitas horizontal ini telah memperkenalkan suku-suku dan daerah-daerah satu dengan yang lain, dan khususnya dikota-kota telah meningkatkan kebiasaan untuk hidup dan bekerja bersama. Dia juga telah membawa suatu akibat yang lain. Pola pertumbuhan ekonomi dijamin kolonial, dijamin pendudukan Jepang, dan dimasa kemerdekaan tidak merata dalam pengaruhnya atas masing-masing daerah di Indonesia. Sebaliknya, kemampuan masing-masing suku atau daerah untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang baru tidak sama pula, karena perbedaan tingkat pendidikan, struktur sosial, pola kebudayaan atau kekuatan, keuangan dan minat berdagang yang berbeda-beda. Di dalam waktu 50 tahun ini, kita telah menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam peranan ekonomi dan politik berbagai suku bangsa, yang diakibatkan oleh perbedaan lajunya kemajuan ini. Hal ini telah membawa perubahan besar dan terus menerus dalam imbalan antar suku bangsa dan antar daerah, yang sering membawa ketegangan-ketegangan sosial yang baru, dan yang merupakan tantangan terus menerus untuk usaha nation-building kita.

Menjalarnya proses modernisasi, monetisasi ekonomi desa, ketidakmampuan desa untuk menampung semua tenaga kerja karena pesatnya penambahan penduduk yang menekan atas sumber-sumber daya desa yang terbatas, tapi juga gangguan keamanan dan gejolak-gejolak peristiwa-peristiwa politik selama 50 tahun ini, telah memperbesar arus urbanisasi. Untuk sebagian, urbanisasi itu juga bersumber pada stagnasi ekonomi kota-kota kecil. Angka-angka statistik memang menyarankan adanya gejala pengurangan penduduk di beberapa kota-kota kecil. Di samping itu urbanisasi juga disebabkan karena lajunya penambahan penduduk kota sendiri dengan jalan kelahiran dan karena pekerjaan musim crang desa dikota. Meskipun demikian, lajunya urbanisasi,

biarpun tinggi, masih sedang, jikalau dibandingkan dengan laju urbanisasi berbagai negara lain di Asia. Yang penting dari sudut perubahan sosial budaya ialah, bahwa proses urbanisasi ini sudah jauh melampaui kemampuan kota-kota besar untuk memberi pelayanan munisipal yang memadai. Maka timbullah pemukiman-pemukiman pendatang baru yang kualitas hidupnya jauh di bawah tingkat minimal yang sesuai dengan martabat manusia. Dalam hubungan ini ternyata pentingnya peranan organisasi-organisasi informal berdasarkan ikatan tradisional daerah asal atau keluarga dan suku. Merekalah yang menampung pendatang ini, membantunya dalam mencari pekerjaan, dan pada umumnya berperan sebagai bantal yang mengurangi akibat gejolak-gejolak sosial serta tekanan jiwa yang menyertai proses transisi ini. Bahwa tingkat kriminalitas atau radikalisasi politik golongan-golongan pendatang ini masih terhitung rendah dikota-kota di Indonesia. Untuk sebagian penting hal ini disebabkan adanya ikatan-ikatan komunal tradisional ini. Sangat pentinglah peranan organisasi-organisasi informal yang berdasarkan solidaritas kelompok-kelompok primer ini dipelihara, dan diberi tempat dan fungsi di dalam usaha pengembangan swadaya kota dalam rangka RT dan RW. Dapat dipertimbangkan misalnya, sejauh mana organisasi-organisasi informal ini dapat diberi tanggung jawab untuk melakukan training/latihan-latihan ketrampilan hidup dan bekerja di daerah perkotaan. Pemakaian radio dan TV - misalnya mengadakan saluran kedua yang tidak ditujukan kepada keperluan sektor modern dan orang gedongan, melainkan khususnya kepada sektor informal kota-kota dan daerah pedesaan- dapat sangat membantu dalam proses peralihan ini, dengan jalan pementasan dagelan, lenong dan "sitcom" ("situation comedies") yang dengan cara yang ringan dan menggairahkan dapat menerangkan dan meringankan kesulitan-kesulitan transisi ini, di samping kursus-kursus ketrampilan. Usaha-usaha semacam ini dapat mengurangi kecenderungan kehidupan kota kearah atomisasi dan tenggelamnya individu-individu

dalam anonimitas kehidupan orang banyak dengan segala akibat atas perilakunya.

Sebagian besar daripada ketegangan sosial didaerah perkotaan timbul pada garis pertemuan antara sektor modern dan sektor informal atau rakyat. Kekawatiran bahwa senantiasa kepentingan modern - atau yang dianggap modern - dimenangkan atas kepentingan sektor informal, khususnya dalam bentuk pengusuran, merupakan sumber ketegangan utama. Berbagai peristiwa telah menunjukkan betapa besar sudah ketegangan dan kegelisahan sosial di bawah permukaan kehidupan normal, dan betapa mudah ketegangan dan kemarahan golongan lemah meletus.

Peningkatan mobilitas horisontal dan vertikal, serta proses urbanisasi, umumnya telah membantu pengluasan bahasa Indonesia, karena interaksi antar suku umumnya lebih intensif, begitupun hubungan dengan sektor modern dan pemerintah, meskipun dikota-kota didaerah dimana para pendatang berbahasa daerah yang sama, pengluasan lingkungan bahasa Indonesia tidak secara otomatis meluas. Dalam pada itu anak-anak para pendatang ini yang bersekolah, akan lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Indonesia. Adapun keperluan latihan ketrampilan hidup dan bekerja dikota untuk para pendatang ini, menimbulkan masalah, dalam bahasa mana latihan-latihan itu harus diberikan supaya mebcapai hasil yang sebesar-besarnya. Di dalam uraian selanjutnya persoalan ini akan dibahas secara lebih luas.

II

Namun, melintasi jalannya sejarah ekonomi, politik dan sosial konvensional ini, terdapat suatu cerita sejarah lain, yang sering kurang diperhatikan, tetapi yang akibat-akibatnya tidak kurang men-

dalam dibandingkan dengan perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial tadi, bahkan makin menguasai problematik pembangunan kita. Cerita itu terutama mengenai masyarakat Jawa, namun karena implikasi-implikasi politiknya, ia juga telah dan sedang mempengaruhi jalannya sejarah seluruh Indonesia.

Cerita sejarah ini menempuh dua jalur. Yang pertama ialah erosi dan proses pengrusakan masyarakat Jawa patrimonial tradisional, yang mengakibatkan stagnasi daerah pedesaan, kemiskinan yang endemis dan pengangguran massal. Jalur kedua di dalam cerita ini ialah usaha-usaha gerakan nasional - penjelmaan daripada kemampuan regeneratif bangsa kita - untuk berulang kali berusaha menangani masalah ini.

Dilihat dari perspektif inilah, perubahan-perubahan sosial budaya di dalam kurun waktu 50 tahun yang lalu ini mendapat arti untuk perjuangan kita seterusnya, termasuk untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan kita dibidang kebudayaan dan bahasa. Perspektif ini kiranya, juga dapat membantu pengertian kita, dan melengkapi pegangan konseptuil kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam usaha pembangunan kita di masa yang akan datang.

Masyarakat patrimonial tradisional, seperti diketahui terdiri dari raja-raja, kaumningrat dan kepala-kepala daerah, sebagai lapisan atas, dan masyarakat pedesaan sebagai lapisan bawah. Keseimbangan kekuatan dan seifat timbal balik dalam hubungan antara kedua lapisan itu pada hakekatnya berdasarkan kelangkaan jumlah penduduk pada waktu itu. Lapisan atas senantiasa harus berunding untuk mendapatkan tenaga kerja cukup untuk keperluannya, sedangkan tenaga kerja itu selalu ada kesempatan untuk pindah dari lingkungan kekuasaan yang bersangkutan ke tempat lain. Hampir dari semua golongan feodal ini bekerja sama dengan VOC dan pemerintah Hindia Belanda dalam pengadaaan hasil bumi untuk exportnya. Dalam proses ini keseimbangan asli dan timbul balik masya-

rakat feodal menjadi timpang, karena pihak Belanda memperbesar kedudukan dan kekuasaan golongan feodal ini, dan kedudukan desa sebagai akibatnya menjadi lemah. Karena tekanan itu pula, struktur sosial desa mulai berubah dari pola pemilikan tanah individuil kesuatu pola yang berangsur-angsur makin berdasarkan pemilikan tanah secara komunal.

"Cultuurstelsel" yang dimulai pada tahun 1830, dapat dianggap sebagai kerjasama besar-besaran yang terakhir antara golongan feodal dan pemerintah Hindia Belanda. Setelah "cultuurstelsel" itu ditinggalkan secara berangsur-angsur, dan kesempatan dibuka untuk penanaman modal besar di Indonesia, pihak Belanda memerlukan hubungan-hubungan yang lebih langsung dengan masyarakat desa untuk mempermudah penyewaan tanah dari orang desa. Maka dimulailah suatu usaha eistimatis kearah defeodalisasi dengan cara mengurangi gengsi dan sumber-sumber kehidupan kaum ningrat ini, serta meniadakan penghormatan wajib kepadanya, termasuk tanda-tanda kehormatannya. Peranan golongan feodal hanya dipakai jikalau perlu untuk mengamankan kepentingan-kepentingan perkebunan Belanda.

Akibat kebijaksanaan ini, tapi untuk sebagian penting juga karena penambahan jumlah penduduk yang sangat pesat, ditambah dengan depresi ekonomi serta mulai habisnya hutan perawan yang dapat dipakai rakyat desa untuk pertanian, maka di dalam kerangka dualisme strukturil ekonomi sosial, telah mulai suatu proses pemiskinan terus menerus, yang akhirnya telah menimbulkan suatu stratifikasi baru, sekarang di dalam desa, yaitu antara golongan yang mempunyai tanah yang cukup, golongan yang mempunyai tanah tapi tidak cukup untuk menjamin hidupnya, serta golongan yang sama sekali tidak mempunyai tanah dan yang jumlahnya terus meningkat dengan pesatnya, yang berjalan terus menerus selama 50 tahun ini. Stratifikasi inilah yang sekarang menjadi beban dan tantangan usaha pembangunan kita.

Pada masa itu masuklah barang-barang buatan hasil industri Eropa yang murah, yang bukan saja di Jawa, tapi juga di India dan Cina, telah merusak habis kerajinan-kerajinan rakyat, baik dikota-kota dan khususnya

didesa-desa. Akhirnya yang tinggal ialah desa yang ditelanjangi dari semua ketrampilan dan kemampuan non-pertanian, dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini, semata-mata sebagai penghasil pangan dan tanaman perdagangan yang sangat peka itu terhadap pasang surutnya konjunktur ekonomi negara-negara industri. Pada waktu inilah mulai, apa yang dinamakan "agricultural involution", dimana bidang pertanian di Jawa mengusahakan untuk mempekerjakan makin banyak orang, tanpa mampu meningkatkan produktivitas ataupun produksinya, dan dimana kemelatan dibagi rata ("shared poverty". Waktu pihak Belanda menyadari betapa parahnya kemiskinan didaerah pertanian, berdasarkan laporan tentang "De Minders Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera", di bawah Ketua Panitia Sisimets, pihak Belanda melancarkan "Ethische Politiek"-nya dengan maksud untuk menaggulangi kemiskinan itu dengan pengluasan pendidikan-, peningkatan kerajinan dan perusahaan-perusahaan kecil, serta pemberian kredit rakyat. Pecahnya Perang Dunia Ke II dan penduduk militer Jepang telah menghentikan usaha ini sebelum berubah.

Laporan-laporan tentang kemiskinan desa itu juga meningkatkan kesadaran pergerakan nasional akan luasnya gejala kemiskinan yang mereka alami sendiri. Maka tidak bernalah apa yang sekarang sering dituduhkan kepada negara-negara Dunia ke III oleh berbagai pihak dinegara industri seakan-akan golongan atas di negara-negara Dunia ke III tidak menghiraukan kemiskinan dinegerinya masing-masing.

Malahan dapat dikatakan sebaliknya, yaitu bahwa gerakan kebangsaan di Indonesia maupun di negara-negara Asia lainnya, bangkit, terutama karena kesadaran bahwa masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan di dalam rangka kolonial, dan bahwa hanya dalam rangka kemerdekaan nasional masalah kemiskinan itu dapat ditangani secara efektif. Yang tidak disadari, atau yang memang sengaja dibiarkan oleh pemerintah Belanda ialah bahwa terus berlangsungnya kebijaksanaan immigra-

sinya terhadap golongan "Vreemde Oosterling", untuk melakukan perdagangan pengumpulan hasil bumi, dan umumnya sebagai unsur penghubung antara masyarakat Belanda dengan masyarakat desa, sebagai golongan tersendiri yang tidak diintegrasikan dengan penduduk pribumi, secara efektif mencegah berkembangnya suatu golongan menengah Indonesia yang dapat menampung kelebihan manusia di daerah pedesaan dalam usaha-usaha produktif.

Tidak perlu kiranya untuk membeberkan disini pemerkosaan desa di Jawa yang dilakukan oleh tentara Jepang, untuk sebagian dengan bantuan pangrehpraja. Hal itu dilakukannya dengan mengumpulkan beras dan tenaga pekerja secara paksa untuk usaha peperangannya. Maka revolusi sosial diberbagai tempat di Jawa, dan juga disekitar beberapa tempat perkebunan diluar Jawa, merupakan reaksi rakyat kecil atas penderitannya, yang juga ditujukan kepada golongan atas setempat, yang telah didiskreditkan itu. Dukungan orang-orang desa kepada perang gerilya dimasa revolusi berlandaskan perasaan umum didaerah pedesaan ini. Namun ketidak mampuan Komite-Komite Nasional untuk memperkembangkan suatu sistim pemerintahan baru yang efektif telah mengakibatkan tegaknya kembali pamongpraja yang disusun kembali sebagai aparaturn pemerintahan utama.

Bahkan, biarpun pada umumnya kedudukan tradisional golongan feodal telah sangat berkurang, ia berhasil memanfaatkan kesempatan-kesempatan pendidikan Barat jaman kolonial, dan dengan demikian dapat menyelamatkan kedudukannya sebagai unsur birokrasi modern di dalam suatu masyarakat merdeka yang tetap berlapis dua.

Apabila kita sekarang, sambil mengingat cerita sejarah ini, melihat keadaan daerah pedesaan, maka tampaklah bahwa selain proses stratifikasi masyarakat desa di dalam 50 tahun ini, besar sekali perubahan dalam pola kehidupannya. Meluasnya pendidikan modern - yang banyak bersifat pendidikan pola kehidupan perkotaan-masuknya pengaruh

media komunikasi modern, meluasnya jala jalan-jalan, pada suatu masa juga politisasi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi desa, monetisasi hubungan-hubungan sosial yang sebelumnya hanya secara implicit merupakan hubungan ekonomi, transport dan masuknya barang-barang buatan kota yang murah yang mendesak barang penghasilan desa sendiri (plastik), ikatan kontraktuil yang makin lama makin menguasai interaksi sosial, dan berkurangnya peranan status, serta akibat-akibat sosial daripada program-program pembangunan pemerintah, mekanisasi dan birokratisasi kehidupan pedesaan, semua perubahan-perubahan ini sedang dan telah merubah secara mendalam pola dan gaya hidup daerah pedesaan. Tidak dapat disangkal pula bahwa berkat bertambah besarnya aliran sumber-sumber daya kedaerah pedesaan dari pusat, tingkat kehidupan desa disebagian besar wilayah Indonesia, dan bukan saja di Jawa, dapat dikatakan telah naik secara berarti. Kestabilan politik, keamanan dan introduksi teknologi baru, telah berhasil meningkatkan produksi pangan serta penghasilan para petani yang turut serta di dalam usaha-usaha ini. Namun sekarang sudah mulai tampak juga batas-batas kemungkinan perbaikan terus menerus tingkat kehidupan desa dengan jalan teknologi yang lebih baik ini. Batas-batas itu ternyata berupa batas-batas struktural maupun institutionil. Maka untuk melanjutkan usaha pembangunan mulai perlu ditangani batas-batas ini dalam suatu usaha rekonstruksi masyarakat Jawa, dan pada umumnya, transformasi struktural masyarakat Indonesia.

Transformasi sosial dan, khususnya rekonstruksi sosial masyarakat Jawa berkisar desekitar 2 masalah pokok. Yang satu adalah pengembangan golongan menengah, yaitu mereka yang tidak mau, atau tidak dapat hidup lagi di dalam lingkungan daerah pedesaan, dan tidak mau atau tidak dapat, menjadi bagian daripada birokrasi pemerintah, menjadi suatu kekuatan produktif yang riil dan berdiri diatas kaki sendiri. Pengembangan golongan menengah ini hendaknya tidak hanya meliputi

golongan swasta modern, melainkan juga dilakukan dengan memupuk dan memperkembangkan potensi yang ada di sektor informal dikota-kota dan diantara tenaga-tenaga non-pertanian didaerah pedesaan, baik melalui lembaga-lembaga baru maupun melalui lembaga-lembaga desa tradisional yang diperkembangkan dan disesuaikan kepada keperluan-keperluan baru.

Kedua, revitalisasi, penghidupan kembali kemampuan swadaya desa agar supaya potensi desa dapat berkembang sesuai dengan kepentingan-kepentingan orang-orang didesa itu sendiri, sehingga desa itu tidak lagi menjadi objek berbagai program pemerintah semata-mata, melainkan menjadi subjek, yang mampu mengurus dan mengembangkan kepentingannya sendiri. Usaha pembangunan dari bawah ini membuka harapan akan kemungkinan mengatasi pengangguran dan kemiskinan absolut, yang menjadi bukti ketidak mampuan masyarakat yang berlapis-ganda. Kedua usaha transformasi sosial, yang dapat dianggap usaha "nationbuilding" secara vertikal, dapat menggerakkan perkembangan sosial, politik dan ekonomi Indonesia kearah differensiasi yang lebih besar, yang diperlukan dalam proses masyarakat Indonesia memperbaharui diri sebagai persiapan untuk memasuki abad ke 21, sebagai suatu masyarakat yang modern dan kuat. Usaha transformasi struktural ini oleh pemerintah Hindia Belanda telah mulai diusahakan tanpa kesadaran bahwa kekuasaan kolonialnya sendiri menjadi penghalang yang terbesar. Setelah kemerdekaan tercapai, berbagai kabinet Republik Indonesia telah mencobanya. Juga berbagai partai politik telah mencoba menangani masalah itu dengan cara-caranya sendiri. Sekarang sekali lagi kita bersiap-siap untuk menanganinya, sekali ini agaknya dari suatu posisi ekonomi yang lebih kuat.

Memang tidak sedikit kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Di bidang sosial budaya saja sudah tampak berbagai masalah yang akan meminta perhatian.

Perubahan-perubahan sebagai akibat masuknya kehidupan modern kedalam desa mempunyai efek kumulatif yang sangat besar, yang mau tak mau menimbulkan kegelisahan yang mendalam, khususnya antara golongan-golongan yang merasakan efek negatifnya, yaitu buruh tani, wanita, petani kecil yang kehidupannya tergantung dari kerajinan tangan dalam waktu senggang dan membantu di waktu panen. Juga termasuk dalam golongan-golongan ini ialah pemuda desa jebolan sekolah, yang tidak mau bekerja lagi di sawah, tidak berani merantau ke kota, dan menganggur di desa.

Kegelisahan itu juga dirasakan karena penghuni desa mengalami, dan harus menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi di luar kekuasaannya. Ditambah pula berkurangnya solidaritas desa karena persaingan di dalam desa mengenai sumber-sumber daya yang terbatas. Maka di desapun kita mulai melihat gejala atomisasi, masing-masing warga desa hanya bersedia mengurus dirinya sendiri, dan mencoba menghindari sebanyak-banyaknya hal-hal yang dapat lebih menyulitkan kehidupannya. Tanda-tanda desintegrasi solidaritas komunal semacam ini, agaknya dapat di atasi dengan diberi peluang kepada desa untuk menyusun dan memakai potensi swadaya berdasarkan solidaritas assosiatif yang baru, dan diberi kesempatan untuk turut bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupannya sendiri dan keluarganya, dalam rangka otonomi desa.

Usaha pengintegrasian dan penggairahan kehidupan desa sebagai suatu unsur masyarakat Indonesia yang mampu bergerak atas kekuatan sendiri, menghadapkan kita juga dengan suatu masalah sosial budaya lain, yang menyarankan perlunya pengembangan suatu kebijaksanaan kebudayaan untuk desa. Masalah itu ialah proses penambahan kemiskinan kebudayaan di daerah pedesaan di Jawa yang telah menyertai proses modernisasi. Proses ini dipercepat dengan masuknya alat-alat elektronis ke dalam desa. Salah satu akibatnya ialah bahwa sehabis panen, para petani

yang relatif kaya tidak lagi menanggapi wayang, melainkan cukup menyewa kaset lengkap dengan penguat suaranya. Banyak pertunjukan rakyat dan mainan anak-anak juga sudah tidak ada lagi karena pengaruh radio dan TV, tapi juga karena nyanyian dan mainan anak-anak yang diajarkan di sekolah kebanyakan merupakan mainan dan nyanyian dari kebudayaan perkotaan, yang tidak menyambung pada kekayaan kebudayaan asli di daerah pedesaan. Maka usaha revitalisasi desa tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan kesenian daerah yang bersangkutan, khususnya di dalam kebudayaan-kebudayaan daerah di Indonesia. Kesenian rakyat memungkinkan komunitas-komunitas yang bersangkutan untuk menghibur diri, untuk menemukan diri kembali dan menyegarkan hidupnya bersama dalam menikmati dan turut serta aktif dalam keseniannya sendiri dengan segala lambang pengerti makna hidupnya. Kemampuan di dalam suatu desa dapat merupakan suatu sumber harga diri dan kebanggaan, yang juga dapat merupakan suatu motivasi untuk keaktifan-keaktifan sosial lainnya. Tidak ada jeleknya agaknya, apabila kompetisi-kompetisi antar desa mengenai kebersihan dan sebagainya, dilengkapi dengan kompetisi di bidang kesenian maupun di bidang sport.

Mengembalikan rasa harga diri kolektif merupakan unsur mutlak dalam usaha revitalisasi desa. Kompetisi antar desa di bidang kesenian itu, juga dapat dikaitkan dengan program-program radio dan TV. Dengan perkataan lain usaha pembangunan dari bawah juga memerlukan desentralisasi dalam "programming" di bidang radio dan TV. Bahkan agaknya apabila dibuka saluran kedua untuk TV, hendaknya saluran itu diarahkan bukan kepada golongan gedongan, melainkan untuk membantu proses revitalisasi daerah pedesaan dan peningkatan gairah sektor informal di daerah kota-kota. Lagi pula, pelipat gandaan jumlah penduduk dalam 25 tahun yang akan datang, dan sifat berangsur-angsurnya peningkatan tingkat kehidupan material, memerlukan kemampuan yang lebih besar di dalam komunitas-komunitas yang padat penduduknya itu untuk meng-

hibur diri dan untuk memperkembangkan tata cara budaya, yang memperkuat kerukunan dan keselarasan kehidupan bersama pada tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Di samping itu, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota ruangan hidup fisik bagi seseorang akan sangat terbatas. Maka khususnya di daerah padat penduduk nanti, kita akan harus mampu memperkembangkan bukan saja ruang hidup fisik, tapi juga ruang hidup di dalam jiwa manusia, mungkin dengan memberikan tempat yang lebih besar kepada peranan keindahan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dengan jalan mendalami kehidupan agama sebagai suatu pengalaman batiniah.

Perubahan-perubahan sosial yang sangat banyak dan sangat pesat ini, yang langsung mengenai kehidupan pribadi atau kehidupan keluarga, karena pindah tempat tinggal atau ganti kerja - misalnya migrasi dari daerah pedesaan ke daerah kota, ketidak pastian hari depan, khususnya bagi golongan yang muda, perubahan dalam sistim nilai yang telah dikenal tanpa tampaknya konfigurasi nilai baru yang jelas, bahkan munculnya nilai-nilai yang berlawanan dengan kebiasaan lama, telah menimbulkan rasa kekosongan dan kebingungan di dalam kalangan yang sangat luas. Untuk sebagian kebingungan ini adalah penyebab kelakuan, yang anti sosial. Sebagian lain mencari kepastian jiwa dan kepastian moral pada agama atau kepercayaannya. Khususnya di kalangan pemuda, hal itu dirasakan. Sangat kurangnya usaha-usaha bimbingan, atau usaha-usaha berupa diskusi radio, majalah dan karangan yang dapat menerangkan kepada yang bingung ini, secara bagaimana dia dapat mengerti keadaannya, dan secara bagaimana ia dapat mengatasinya. Adanya lebih banyak majalah yang secara serius mempelajari masalah psikologis, sosiologis serta ekonomis yang melandasi kebingungan ini, selain membantu orang-orang yang bersangkutan, juga dapat mempercepat proses kristalisasi dan sosialisasi konfigurasi nilai baru yang dapat memberi

pegangan kepada manusia dalam masyarakat peralihan kita ini. Sudah barang tentu masalah pemuda bukan semata-mata suatu masalah bimbingan psikologis. Hal ini merupakan sebagian saja dari suatu permasalahan yang lebih luas. Jumlah pemuda belum pernah sebesar sekarang ini, baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase daripada keseluruhan jumlah penduduk, dan kecenderungan bertambah ini tampaknya masih akan berjalan terus untuk sementara waktu. Struktur masyarakat kita seperti diterangkan di atas, tidak mampu untuk menampung jumlah pemuda yang demikian besar ini. Masalahnya bukan hanya pengadaan kesempatan kerja bagi mereka, melainkan diperlukan juga peluang-peluang bagi golongan muda ini, untuk memikul tanggung jawab sosial pada umur yang lebih muda daripada sekarang. Yang diperlukan adalah suatu peranan di dalam usaha pembangunan yang lebih jelas dan yang memberi kemungkinan bagi mereka untuk menguji dan memperkembangkan diri. Hal itu akan dapat mengembalikan "sense of purpose", rasa tujuan yang sekarang kurang jelas tampaknya bagi generasi muda itu. Berlainan dengan generasi 45 yang melihat dirinya sebagai wahana dan penjelmaan daripada revolusi dan pembaharuan Indonesia.

III

Tidak secara kebetulan gerakan nasional kita mulai sebagai suatu gerakan kebudayaan. Sebab jikalau ada suatu ciri yang khas pada bangsa Indonesia yang menampakkan diri sepanjang sejarahnya, yaitu pemusatan perhatian dan tenaganya atas budi dayanya manusia sebagai azas pengertian dan pengaturannya mengenai dirinya sendiri sebagai manusia, maupun dalam menghadapi realitas sosialnya. Masa kebangkitan nasional, yang juga merupakan permulaan proses regenerasi dan reorientasi kebudayaan, merupakan suatu periode sejarah yang penuh ragi kecendekiaan.

Pada waktu itu kita dapat menyaksikan pencarian dan pemasukan gagasan-gagasan konseptual dan integratif baru yang dapat mencakup permasalahan-permasalahan serta aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia, dan yang sekaligus dapat menerangkan situasi maupun menggerakkan kekuatan terpendamnya. Pada waktu inilah paham nasionalisme Indonesia diartikulasikan. Marxisme mampu menerangkan kenyataan penjajahan sebagai suatu fenomena sejarah, yang tidak menambah rasa penghinaan yang sedang menusuk hati kita sebagai bangsa yang dijajah, dan sekaligus mampu merangkul idam-idaman tradisional mengenai kesamarataan dan keadilan sosial. Islam, yang di dalam berbagai peperangan dan pemberontakan melawan penegakkan kekuasaan kolonial, sering merupakan ideologi tandingan terhadap Belanda, juga bergumul dengan tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru, baik yang timbul dari keadaan kolonial maupun dari gagasan-gagasan dunia Islam yang baru. Dalam masa itu juga paham demokrasi modern dirumuskan kembali dalam kaitannya dengan unsur-unsur dan jiwa kehidupan demokrasi tradisional di daerah pedesaan, sebelum ini dirusakkan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik kolonial, serta tekanan penambahan penduduk. Tapi yang juga masuk ialah paham-paham fasis dengan pandangan-pandangannya mengenai susunan masyarakat secara korporatif, unsur-unsur rasialnya serta pendewaan paham bangsa sebagai suatu kolektif organik yang membatasi peranan dan perkembangan manusia sebagai individu. Paham ini kemudian diperkuat dimasa pendudukan Jepang, meskipun pada akhirnya kurang mendapat pasaran. Namun alam pikiran itu sedikit banyak masih berbekas juga di dalam kebudayaan politik kita setelah kemerdekaan tercapai. Di dalam kebudayaan Indonesia ternyata semua gagasan ini berkumandang dengan unsur-unsur tertentu di dalam kompleks kebudayaan-kebudayaan di Indonesia. Keaneka-ragaman gerakan dan organisasi politik, yang semuanya mengambil tempat di dalam proses kebangkitan nasional ini, mencerminkan hal ini, baik sebagai

unsur dominan ataupun sebagai aliran minoritas. Ketahanan berbagai kebudayaan daerah juga tercermin di dalam gerakan nasional, baik dalam bentuk organisasi-organisasi neo-tradisional tersendiri, maupun sebagai unsur atau aliran dalam organisasi-organisasi lain. Walaupun sekarang gelombang penyebaran ideologi-ideologi besar diseluruh dunia sudah menjadi surut, dan kekurangan relevansinya untuk pembangunan Indonesia juga sudah menjadi lebih jelas, mereka telah sedikit banyaknya berhasil memodernisasikan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi bangsa Indonesia yang terpendam di dalam masyarakat dan kebudayaan tradisional. Semua ini akhirnya menjadi bekal dalam pemwujudan dan pengembangan konsepsi-konsepsi Indonesia dalam usaha pembangunan masyarakat. Gagasan-gagasan ini pula yang menjadi faktor dalam perubahan-perubahan sosial budaya di Indonesia, ataupun sebagai faktor penyebab, atau sebagai faktor yang mewujudkan persepsi dan jawaban atas perubahan sosial budaya itu. Dan di dalam proses itu bahasa Indonesia sangat diperkaya, baik dalam peristilahannya, kemampuan konseptuainya maupun dalam dayanya untuk menggerakkan manusia. Kita harus berterima kasih untuk selama-lamanya kepada tokoh-tokoh seperti : Tan Malaka, Soekarno, Hatta dan Moh. Yamin untuk hal itu.

Perdebatan dan polemik tajam yang merupakan ciri di dalam proses pergumulan dengan gagasan-gagasan yang datang dari luar, dengan nilai-nilai yang berakar di dalam sejarah kebudayaan kita sendiri, serta dengan masalah-masalah keterbelakangan, kemiskinan dan pengangguran, telah menghidupkan tema-tema permasalahan yang senantiasa menampilkan diri kembali, setiap kali bangsa Indonesia mengharapi persimpangan jalan dalam sejarahnya, atau setiap kali ia harus memilih metoda perjuangan, urutan prioritasnya dan organisasi politik serta masyarakatnya. Diantara tema-tema besar itu ialah pilihan antara penggalangan kekuasaan dan pemakaian kekuasaan ("machtsvorming en

machtsaanwending") dengan pendidikan politik dan peningkatan kesadaran; antara agitasi dan aksi massa pada satu pihak, dan pendewasaan bangsa dan pembebasan manusia Indonesia pada pihak lain; antara kekuasaan negara yang absolut dengan kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi dan hak-hak azasi manusia; antara persoalan apakah negara atau manusia dan masyarakat, adalah pangkal tolak dan tujuan perjuangan bangsa; antara elitisme dan populisme, baik yang bernada jacobinis dan yang bernada kerakyatan; antara paternalisme dan swadaya rakyat; antara disiplin nasional dan kreativitas perseorangan dan komunitas; antara penghayatan kehidupan politik oleh gambaran keagamaan atas negara atau oleh gambaran agama tentang manusia; antara pembangunan dari atas atau dari bawah. Sejarah Indonesia setelah kemerdekaan dapat dilihat sebagai usaha untuk mencari jalan yang tepat antara kutub-kutub yang berlawanan ini, dan untuk mendamaikan tuntutan-tuntutan yang berlawanan dalam rangka ini. Satu pelajaran yang dapat kita tarik dari pengalaman ini - dan pelajaran itu juga dapat kita tarik dari pengalaman penjajahan yang lamanya berbeda-beda untuk berbagai daerah di Indonesia - ialah bahwa kepribadian kebudayaan Indonesia dan subyektifitas bangsa Indonesia yang menjadi assensinya, tetap dapat bertahan terhadap pengaruh-pengaruh luar yang kuat dan beraneka ragam itu. Hal ini telah memberikan kepada bangsa Indonesia suatu kepercayaan kepada dirinya sendiri, maupun kepada kemampuan kebudayaannya, untuk memberikan respons yang kreatif atas tantangan-tantangan dari luar itu. Suatu bentuk sosial memang hanya dapat menyelamatkan hidupnya, jikalau ia mampu menerima segala informasi dari lingkungan disekitarnya, dan jika ia dapat memanfaatkannya untuk menyesuaikan strukturnya sendiri. Bahkan sejarah Indonesia juga menunjukkan kemunduran kreatifitasnya dan ketahanannya pada waktu ia terisolasi atau mengisolasi diri, seperti dalam respons raja-raja Mataram semula terhadap penyebaran kekuasaan Belanda.

Sekarang kita berada di dalam suatu situasi sosial budaya dimana kebudayaan nasional masih dalam proses-proses mewujudkan corak-coraknya sendiri. Pencarian itu terjadi dalam interaksi terus-menerus, namun masih belum cukup, antara dia sendiri dengan kebudayaan-kebudayaan daerah yang masing-masing juga mengalami perubahan, maupun dalam interaksi terus menerus dengan kebudayaan-kebudayaan luar negeri dengan segala kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaannya, tapi yang sendiri juga mengalami krisis. Bahaya bahwa Indonesia terhanyut dalam arus kebudayaan internasional, sehingga pola kehidupan elitanya menjadi terasing dari kepribadian bangsa sendiri, akibat meniru-niru pola konsumsi internasional yang silih berganti selernya, dibatasi oleh karena mau tak mau, kita tidak dapat melarikan diri dari masalah-masalah kita di dalam negeri kita sendiri, antara lain pengangguran, kemiskinan dan ketidakadilan, yang akan menumpas kita, jikalau kita tidak menangannya secara efektif. Berhasil tidaknya usaha itu akan banyak tergantung dari vitalitas dan kreatifitas kebudayaan kita sendiri. Maka disinilah terletak suatu tantangan yang sangat menentukan bagi Bahasa Indonesia.

IV

Jikalau pembangunan sosial dan transformasi struktural masyarakat Indonesia merupakan tantangan utama yang harus kita hadapi dalam 50 tahun yang akan datang, dengan jalan mendobrak pola berlapis-gandanya masyarakat Indonesia dalam lapisan atas dan lapisan daerah pedesaan, menuju kepada suatu masyarakat yang lebih banyak lapisannya, dan yang kemungkinan mobilitas keatasnya lebih besar, maka akan menjadi juga lebih jelas faktor-faktor sosial-budaya mana yang harus diperhatikan dalam proses perkembangan bahasa Indonesia selama 50

tahun yang sudah ini, dan faktor-faktor mana yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijaksanaan pengembangan bahasa nasional untuk tahap berikutnya.

Seperti telah jelas dari uraian tadi, dinamika proses transformasi itu tergantung dari peningkatan ketrampilan, kemampuan berorganisasi, dan terangsangnya potensi pembaharuan, inovasi, inisiatif dan kreatifitas di daerah pedesaan, baik pada tingkat pribadi maupun pada tingkat kolektif.

Hal ini membuka pertanyaan mengenai dimana, dan dengan jalan apa, golongan yang sosial lemah ini bisa mendapatkan pengetahuan yang diperlukannya untuk maju sendiri; artinya bagaimanakah pola distribusi pengetahuan di Indonesia.

Boleh dikatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi wadah tunggal informasi yang diperlukan untuk kemajuan dan pembangunan. Benar, bahasa Indonesia telah memasuki daerah pedesaan dengan perantara sekolah-sekolah. Namun kecuali di daerah-daerah dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu, di daerah pedesaan bahasa daerah tetap menjadi bahasa yang dipakai di luar sekolah. Disebagian besar wilayah negara Indonesia, masuknya komunikasi elektronik ke daerah pedesaan telah menciptakan suatu lingkungan dimana bahasa Indonesia dimengerti. Pengertian bahasa Indonesiannya mungkin cukup untuk mengikuti latihan, training, yaitu menyampaikan informasi sederhana yang terbatas untuk dipakai dalam tindakan-tindakan terbatas guna mencapai suatu sasaran terbatas. Namun penguasaan pasif suatu bahasa belum berarti bahwa informasi dan pesan-pesan yang sampai kepada warga desa dalam bahasa Indonesia itu dapat merangsangnya untuk mengambil prakarsa dan untuk memanfaatkannya secara kreatif dan inovatif. Dia dapat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya oleh aparat pemerintah, tapi seperti diterangkan diatas, kita sudah hampir mencapai batas daripada

apa yang bisa dicapai dibidang pembangunan dengan jalan itu. Maka timbullah pertanyaan, apa yang harus dilakukan dalam bidang bahasa agar supaya informasi yang disampaikan dalam bahasa itu sungguh-sungguh diintegrasikan di dalam kebudayaan komunitas yang bersangkutan, dan dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dan kepentingan-kepentingan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga di desa itu, sehingga informasi itu menjadi miliknya dan menjadi landasan bagi keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri mengenai apa yang hendak dilakukannya. Yang terpenting agaknya dalam hubungan ini adalah dibukanya kemungkinan baginya untuk berpartisipasi dalam menentukan informasi yang diperlukan, selaras dengan keinginannya sendiri, serta dalam bentuk dan dengan cara pembawaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan orientasi kebudayaannya. Hal ini berarti desentralisasi pembuatan program siaran media elektronik ketingkat yang paling dekat kepada desa, dan partisipasi warga desa didalam program-program itu, serta pengolahan dan pembicaraan bersama daripada informasi itu di dalam lingkungan desa. Hal ini berarti paling sedikitnya, perlunya pengembangan bahasa Indonesia dari bahasa kota menjadi bahasa rakyat desa, sesuai dengan tingkat kecendikiaan dan orientasi kebudayaan daerah pedesaan.

Disini terlihat juga masalah dalam bahasa perantara mana pemberantasan buta huruf pada tingkat pedesaan dapat dilakukan seefektif-efektifnya. Kemampuan fungsional membaca dan menulis merupakan sarana perubahan sosial utama. Dia mempengaruhi lajunya penyesuaian adat kebiasaan dan ketrampilan tradisionil kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Dia meningkatkan kesediaan untuk mencari jalan-jalan dan cara-cara yang baru di dalam bidang pertanian, teknologi dan rumah tangga. Begitupun dia dapat mempercepat peningkatan ketrampilan dan pengembangan macam-macam pekerjaan yang baru. Dia meningkatkan

mobilitas horizontal maupun vertikal dan juga mempengaruhi perkembangan manusia dan pemekaran potensi-potensi dan bakat yang terpendam dalam dirinya. Di dalam hubungan ini perlu dipertanyakan apakah bahasa Indonesia pada tingkat perkembangan sekarang akan dapat mencapai tujuan-tujuan itu secara lebih efektif, atautkah bahasa daerah?

Perlu sekaligus dipertimbangkan bahwa beberapa bahasa daerah pada satu pihak menjamin kesinambungan kontinuitas kebudayaan, suatu syarat penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa yang sehat, namun pada pihak lain bahasa-bahasa daerah itu sangat terjalin dengan stratifikasi sosial tradisional, yang justru harus diatasi jikalau usaha pembangunan sosial hendak berhasil. Dalam proses sosialisasi anak-anak, sianak pagi-pagi sudah, melalui bahasa daerahnya itu, belajar melihat pengelapian masyarakatnya sebagai sesuatu yang wajar dan langgeng, yang tidak dapat dan tidak boleh dirubah.

Oleh karena itu bahasa juga merupakan alat suatu kebudayaan untuk meneruskan dan melanggengkan suatu stratifikasi sosial. Tantangan bagi perkembangan bahasa Indonesia justru sebaliknya. Dalam hubungan ini juga perlu dipersoalkan sampai dimana di dalam lingkungan hidup dua bahasa ("bilingual") di alam Indonesia ini, pendidikan dalam dua bahasa, dan pengalihan dari satu bahasa pengantar ke bahasa pengantar lainnya, tidak secara sistematis merugikan golongan itu dalam kesempatan maju, dibandingkan dengan anak-anak yang dididik dalam satu bahasa selama seluruh masa sekolah dan di dalam lingkungan keluarga, dan sampai dimana kemampuan kita untuk mengurangi "handicap" itu. Sebenarnya merangsang dinamik pembangunan dari bawah ini membuka kembali masalah peranan dan hubungan dwitunggal antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan potensi kedua bahasa untuk merangsang dinamik itu. Pasti sudah, bahwa selama bahasa Indonesia belum mampu untuk menjadi bahasa rakyat dalam usaha pembaharuan kebudayaan, bahasa daerah akan harus dipakai.

Karena dikelak kemudian hari akan ada konperensi mengenai bahasa daerah, maka disini cukup masalah ini disinggung saja, tanpa memperkembangkan implikasi-implikasinya yang sangat pelik itu, untuk politik bahasa dan untuk politik integrasi nasional pada umumnya.

Tak seorangpun dapat menyangkal kemajuan yang pesat lagi luas yang telah diperlihatkan oleh perkembangan bahasa Indonesia. Dalam 50 tahun ini dia telah berkembang dari bahasa politik untuk menggalang kekuatan dalam perjuangan anti kolonialisme, dan sebagai pernyataan keyakinan dan tekad bangsa Indonesia untuk hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka, menjadi bahasa negara dan bahasa nasional yang cukup mampu untuk menampung dan mengungkapkan segala keperluan kehidupan negara. Dia telah berhasil menjadi bahasa perantara dan bahasa pergaulan antar daerah dan antar suku. Munculnya pengarang-pengarang dan penyair-penyair terkemuka dalam bahasa Indonesia, yang tidak berasal dari daerah dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa ibunya, dan yang pemakaiannya telah, dan terus menerus, memperkaya kemampuan expressif bahasa Indonesia, telah membuktikan kreatifitas dan tercapainya taraf kedewasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebudayaan nasional. Dia telah juga berhasil menjadi bahasa kemajuan sosial, seperti, di jaman kolonial, bahasa Belandalah menjadi wahana mutlak untuk "upward mobility".

Sebaliknya, gambaran tentang tetap berlapis gandanya masyarakat Indonesia sepanjang masa 50 tahun ini, juga menunjukkan bahwa tempat keberhasilannya ialah terutama dilapisan atas. Dengan perkataan lain, kurun jaman 50 tahun yang pertama ini telah menunjukkan keberhasilannya bahasa Indonesia terutama sebagai bahasa elite. Persoalan yang kita hadapi sekarang ialah, kalau di dalam 50 tahun yang lalu bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana integrasi politik dan alat perjuangan anti kolonial, sanggupkah dalam 50 tahun yang akan datang

ia menjadi wahana transformasi sosial masyarakat Indonesia ?

Sudah barang tentu pengembangan bahasa Indonesia sebagai wahana transformasi sosial tidak merupakan satu-satunya kaitan dengan, atau interaksi antara, perubahan-perubahan sosial budaya dan perkembangan bahasa. Suatu bahasa mencerminkan dalam perkembangan dan perubahan-perubahan yang mempunyai arti sosial, perkembangan kondisi-kondisi sosial baru, karena bahasa memang adalah suatu alat komunikasi sosial. Kata-kata baru menjadi lazim dan berbagai kata lama hilang atau mengalami perubahan. Berbagai gagasan golongan-golongan yang berkuasa pada suatu tahap sejarah dapat hilang dengan perputaran sejarah berikutnya, dan penjelmaan-penjelmaannya dalam bahasa juga dapat turut hilang. Maka kosa kata dan gaya suatu bahasa mencerminkan perubahan-perubahan sejarah yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Kosa kata bahasa memang bagian yang paling cepat mencerminkan perubahan-perubahan dalam masyarakat dengan munculnya kata-kata baru dan hilangnya kata-kata yang sudah usang, ataupun dengan perubahan makna. Juga sintaksis dapat berubah, biarpun jauh lebih lambat dan berangsur-angsur. Dalam bahasa Indonesia interaksi yang beraneka ragam ini agakny menjadi lebih jelas, dan dapat memperlihatkan implikasi-implikasinya untuk kebijaksanaan pengembangan bahasa seterusnya, jikalau kita menyusunnya disekitar tiga pertanyaan :

1. Sampai dimana bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa persatuan?
2. Sampai dimana bahasa Indonesia berhasil menjadi wahana modernisasi kebudayaan, dan khususnya berhasil menjadi alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi?
3. Sampai dimana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana aspirasi bangsa kearah pendemokrasian masyarakat?

Adapun pertanyaan yang pertama, sejarah 50 tahun ini telah menunjukkan bahwa wajah permasalahan persatuan nasional terus menerus berubah. Setiap kurun sejarah dan demikian pula setiap tahap pembangunan menampilkan ujud permasalahan persatuan tersendiri. Perubahan-perubahan di bidang sosial ekonomi juga merubah terus menerus imbalancedan dan pola distribusi kekuasaan antar daerah dan antar suku, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Dan hal ini sering membawa ketegangan sosial politik yang menyangkut kohesi dan persatuan nasional. Perkembangan di bidang pendidikan pun telah dan akan mempengaruhi ikatan-ikatan solidaritas dan kepercayaan antar suku dan antar daerah. Kalau di jaman kolonial keakraban dan hubungan saling percaya mempercayai antara pemuda-pemuda dari berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia tidak dipupuk dalam sejumlah kecil sekolah-sekolah Hindia Belanda, tempat pendidikan pemuda-pemuda itu, dan jika di dalam masa revolusi pemuda-pemuda yang beraneka ragam asal daerahnya, tidak belajar dan hidup bersama dengan memakai bahasa nasional di dalam universitas Gajah Mada dan beberapa universitas lain di daerah Republik Indonesia, maka sulitlah untuk membayangkan bahwa negara Indonesia dapat muncul sebagai negara kesatuan dan dapat keluar dengan selamat dari konflik-konflik politik ideologis dan regional, yang telah melanda bangsa kita dalam tahun 50-an. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan usaha nationbuilding tidak pernah akan dapat dianggap selesai.

Dalam segala usaha perluasan pendidikan kita akan harus menjaga supaya selalu cukup terdapat kesempatan bagi generasi-generasi muda dari semua daerah Indonesia, dalam masa yang akan datang, untuk tetap belajar dan hidup bersama dalam lingkungan satu bahasa, bukan saja di universitas-universitas di pusat dan kota-kota besar, tapi juga di dalam universitas-universitas di daerah-daerah yang agak jauh dari pola lalu-lintas kecendekiaan.

Perlu dijaga supaya susunan korps dosen maupun susunan mahasiswa selalu multi-etnis dan multi-agama dan memakai bahasa Indonesia dalam hubungan formal dan informalnya.

Dalam hubungan ini perlu juga disinyalir beberapa gejala yang, jikalau dibiarkan, dapat menjadi tendensi regresif dalam peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Kita semua telah melihat gejala pemakaian bahasa daerah di berbagai kantor-kantor pemerintah di pusat maupun di daerah, ataupun dikedutaan-kedutaan besar kita di luar negeri, khususnya dalam hubungan kedinasan yang tidak berupa rapat atau surat menyurat formal.

Untuk sebagian hal itu mungkin terjadi karena bahasa Indonesia belum berhasil menjadi bahasa keakraban, bahasa intim. Boleh dikatakan bahwa bahasa intim itu baru berkembang di Jakarta dan di Medan, khususnya antara generasi muda. Kreatifitas ekspresif golongan muda dalam pemakaian bahasa santainya, merupakan bekal untuk pengembangan bahasa Indonesia yang perlu lebih diperhatikan, agaknya, oleh ahli-ahli bahasa dan perumus-perumus kebijaksanaan bahasa kita.

Bagi generasi yang lebih tua kunci yang mempertandakan sifat hubungan yang informal dan akrab ialah pemakaian campuran bahasa Indonesia, dan jika situasi memungkinkannya, bahasa daerah atau bahasa Belanda. Untuk generasi cendekiawan muda kuncinya ialah pemakaian campuran bahasa Indonesia dan Inggris, atau bahasa campuran Indonesia dan daerah.

Gejala-gejala ini pada dirinya sendiri belum merupakan suatu masalah yang membahayakan semangat persatuan bangsa. Dia merupakan suatu fenomena yang lazim terdapat di dalam lingkungan dua bahasa, khususnya dimana satu diantaranya merupakan bahasa bertingkat yang mencerminkan stratifikasi masyarakat ("diglossia"). Namun masalahnya cukup serius agaknya untuk menempatkan pada acara penentuan kebijaksanaan pengembangan bahasa Indonesia dan pada acara penelitian para ahli bahasa

kita, masalah pengembangan bahasa Indonesia sebagai wahana keakraban, justru untuk menjamin penerusan bahasa dari generasi ke generasi, demi untuk hari depan kita.

Mungkin sekali tekanan-tekanan kearah pemakaian bahasa daerah pada tingkat nasional dapat dikurangi apabila bahasa Indonesia, yang terutama masih merupakan bahasa pergaulan formal dan resmi, diperkaya dengan perbendaharaan bahasa daerah dengan usaha penterjemahan sastra, filsafah, idiom dan pepatah-petitih bahasa-bahasa daerah, serta istilah-istilah kesenian daerah, kedalam bahasa Indonesia. Hal itu toh harus dikerjakan, biarpun pada dewasa ini belum dikerjakan atas skala yang memadai, untuk memperpadukan perbendaharaan substantif kebudayaan-kebudayaan daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Perlu pula disini disebut suatu persoalan yang melintasi semua persoalan lain di bidang pengembangan bahasa yang disebut di atas ini. Persoalan itu ialah kurangnya penguasaan bahasa Indonesia, jupa pada mereka yang telah mendapat seluruh pendidikannya dalam bahasa Indonesia. Kekurangan itu tampak sekali pada tingkat pendidikan tinggi, pada pelamaran pekerjaan tingkat tinggi, tapi juga dalam keluhan-keluhan dari golongan-golongan masyarakat tentang kecerobohan pemakaian bahasa Indonesia disurat-surat kabar, majalah-majalah, iklan-iklan serta nama-nama gedung. Yang dimaksudkan disini buka keluhan-keluhan dari golongan "puris" bahasa. Keluhan semacam itu selalu akan ada dan memang terdapat dimana-mana di dunia ini. Juga tidak dimaksudkan kebebasan memakai bahasa yang diperlukan suatu bahasa yang sedang berkembang dengan pesatnya, sebagai lingkungan subur untuk pengungkapan-pengungkapan kreatifitas bahasa. Yang dimaksudkan ialah dua hal :

Pertama, kecerobohan pemakaian bahasa yang mencerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab pribadi masing-masing untuk pengembangan bahasa Indonesia, pengembangan masyarakat Indonesia, dan pembangunan

Indonesia. Karena berbagai sebab, - beberapa diantaranya dapat juga dimengerti, - mereka tidak merasa terlibat dan bersikap acuh tak acuh. Bagi mereka perjuangan bangsa sudah selesai, tidak ada lagi tugas nasional yang merupakan tanggung jawab mereka. Yang disebut "kebudayaan santai" adalah penjelmaan sikap ini. Sekarang tinggal mengurus diri sendiri dalam suatu "privatisme" yang merupakan gejala yang baru dalam sejarah nasional sejak kemerdekaan. Ataupun tinggal menikmati sepenuhnya hari ini. Hari esok dipikirkan nanti. Ataupun tinggal mengejar secara sungguh-sungguh dan gigih kepentingan diri sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, atau kepentingan umum.

"Kebudayaan santai" ini sebenarnya juga suatu pola hidup di mana barang cap asing dan nama asing lebih berharga. Maka timbullah suatu ketergantungan yang berlebih-lebihan dari hasil buatan ekonomi dan kebudayaan luar negeri.

Alienasi, rasa keterasingan, serta kendornya semangat nasional diberbagai kalangan masyarakat Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu masalah politik. Namun ia tercermin juga dalam pengembangan bahasa. Persoalan kedua ialah, kekurang mampuan memakai bahasa Indonesia untuk membentangkan suatu pikiran secara teratur dan tersusun secara logis. Persoalan ini perlu disebut disini, bukan saja karena dia ternyata merupakan hambatan serius dalam kemajuan sosial individu yang bersangkutan, tetapi ia juga menghalangi komunikasi konsepsi - konsepsi abstrak yang kompleks, yang diperlukan dalam pengolahan masyarakat Indonesia dalam arti yang luas. Dia juga menghalangi kemampuan inovatif dan kesanggupan nasional untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka kini dan mendatang.

Ada yang mencoba menerangkan gejala ini dengan menunjuk kepada perubahan lingkungan bahasa kearah penekanan unsur lisan dan visuil karena pengaruh alat komunikasi elektronis. Alasan itu tidak mencukupi.

Peralihan lingkungan bahasa semacam itu juga terjadi di negara-negara tetangga kita, dan ternyata tidak mengurangi kemampuan mereka untuk menguraikan pendapatnya secara efektif dan meyakinkan, dan untuk menguasai ilmu dan teknologi.

Jalan untuk mengatasi kekurangan ini agaknya bukan dalam mengajarkan logika formal di sekolah-sekolah, seperti yang sering dianjurkan. Mungkin sekali jalan keluarnya jauh lebih mudah, yaitu dengan membiasakan si anak didik itu sedari sekolah dasar, dan terus menerus pada setiap tingkat pendidikan, untuk mengarang tentang hal-hal yang makin lama makin sukar dan abstrak, untuk kemudian didiskusikan di dalam kelas, bukan saja mengenai isinya, tetapi juga mengenai cara pengutaraan pikiran.

Adapun peranan bahasa Indonesia sebagai wahana modernisasi dan alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan yang telah dicapai juga tidak dapat disangkal. Bahasa Indonesia sudah merupakan wahana kemajuan sosial ("upward mobility") dan perluasan komunikasi ("language of wider communication"). Perluasan kemampuan bahasa di bidang hukum, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lain, tapi juga di bidang kesusasteraan, peningkatan kemampuan *expressif* dalam pengucapan berbagai perasaan halus dan kekayaan kehidupan batin di dalam karya-karya sastra dan sajak-sajak modern kita, semua telah menunjukkan vitalitas dan kreatifitas bahasa Indonesia yang hampir-hampir menakjubkan. Untuk sebagian penting, karena kemajuan-kemajuan itulah kita sekarang mampu bergumul dengan masalah-masalah kehidupan modern, dengan segala tantangannya yang baru, dalam bahasa Indonesia.

Namun kekurangan komunikasi horisontal karena kurangnya bahan bacaan, menyebabkan perkembangan-perkembangan bahasa yang penting itu tidak cepat masuk dalam lalu-lintas kecendekiaan bangsa kita, sehingga tidak dikenal dan dipakai umum, dan tetap tersimpan dalam masing - masing

kotak tersendiri. Juga, betapa besarpun kemajuan yang dapat dicatat dalam kemampuan bahasa Indonesia di dalam proses pembaharuan kebudayaan kita, dan betapa besar sekalipun kemajuan kita di bidang perluasan kemampuan bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, perjuangan bangsa kita tidak membolehkan kita hanya melihat kemajuan itu dalam perbandingannya dengan masa yang silam. Kita perlu juga membandingkannya dengan keperluan-keperluan suatu masyarakat yang sedang membangun dan berubah dengan pesat, dan yang masih harus menangani perubahan struktural susunan masyarakatnya, sambil dia menghadapi pula kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaan dari luar. Di lihat dari sudut itu, kemajuan-kemajuan itu belum memadai.

Seperti diantaranya dapat dilihat dari kesimpulan-kesimpulan seminar Hukum dan Bahasa Indonesia yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Medan/Prapat, tahun 1974.

Kita juga harus membandingkannya dengan kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh negara-negara Asia lainnya, yang tidak memakai suatu bahasa nasional, melainkan bahasa Inggris sebagai wahana modernisasinya. Sulit untuk membuktikan korelasi langsung antara jumlah dan mutu sarjana yang dihasilkan oleh sistim pendidikan negara-negara itu dengan kemampuan sistim pendidikan kita yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara. Namun dapat diduga bahwa kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih harus ditingkatkan dalam waktu yang pendek, jikalau Indonesia tidak mau ketinggalan dalam persaingan internasional. Juga kecenderungan yang makin meningkat antara sarjana sarjana Indonesia untuk meloncat ke bahasa Inggris dalam pembicaraan-pembicaraan diantara mereka sendiri, kalau mendiskusikan masalah-masalah ilmiah yang sulit, merupakan tanda kearah itu. Kita harus menjaga supaya kita tidak kembali kepada hierarchi bahasa di jaman kolonial, di mana bahasa daerah menjadi bahasa paling rendah, yaitu

sebagai bahasa pergaulan antar keluarga dan antar sahabat, bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang lebih luas pada tingkat kedua, dan bahasa Belanda untuk maju, untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, dan untuk masuk dalam golongan elite bumi putera.

Di dalam bagian uraian ini, ilmu pengetahuan dibicarakan sebagai suatu kumpulan pengetahuan sistimatis yang sudah ada, dan yang akar-akarnya pada hakekatnya berada di luar Indonesia. Semula kita harapkan bahwa pada tingkat universitas di seluruh Indonesia kemajuan dalam bahasa Inggris akan mencukupi untuk memasuki alam yang kaya raya ini. Ternyata harapan itu suatu khayalan saja. Maka sudah tiba waktunya untuk menempuh jalan lain dengan segala bekal, dana dan daya yang diperlukan untuk perjalanan itu. Jelas sekarang, bahwa penguasaan ilmu pengetahuan itu memerlukan suatu kemampuan terjemahan ilmiah yang besar dan berlembaga. Jepang yang bertekad memodernisasikan dirinya dengan memakai bahasanya sendiri, telah berhasil dalam usaha ini. Sekarang hampir tidak ada satu penerbitan ilmiah dan sastra yang penting di dunia, yang tidak, dalam waktu yang singkat, dipasarkan dalam bahasa Jepang. Di sana pembinaan kemampuan menterjemah lebih dahulu dipelopori oleh pemerintah. Sekarang proses itu hampir seluruhnya ditangani perusahaan-perusahaan komersial atau lembaga-lembaga ilmiah sendiri. Demikianpun Uni Soviet telah berhasil, dengan pembinaan pelembagaan yang sesuai dengan sistim sosialnya sendiri. Pilihan beberapa negara yang sedang berkembang untuk memakai bahasa Inggris telah membuka keseluruhan kekayaan ilmiah dan teknologi di dunia Barat bagi mereka, dan telah memberikan kepada mereka suatu keuntungan pendahuluan yang berarti. Sebaliknya pilihan itu juga membawa biaya yang tinggi, dalam arti terkembangnya suatu golongan ilmuawan yang sangat elitistis dan teknokratis, dan suatu "braindrain" yang sangat besar. Hal itu disebabkan karena orientasi ilmiahnya

tidak terutama pada masalah-masalah negara dan bangsanya sendiri, melainkan kepada spesialisasi yang tidak atau belum relevan untuk persoalan negara.

Keperluan pembangunan dan transformasi sosial kita sendiri memaksakan kita untuk mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan kita untuk sebagian yang jauh lebih besar kemasalah-masalah kita sendiri, dan memaksakan kita, dalam kita bergumul dengan masalah-masalah itu, untuk memperkembangkan konsepsi-konsepsi dan alat-alat analisa ilmiah kita sendiri. Disini kita bicara tidak hanya mengenai applikasi yang relevan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, melainkan khususnya tentang peng"aslian" ("indigenisation") daripada proses pengadaan pengetahuan ilmiah dan teknologi baru, dan pengembangan kreatifitas intelektual yang berakar di bumi Indonesia sendiri. Maka tidak cukup dilakukan usaha penterjemahan ilmiah secara besar-besaran. Perlu juga diprogramkan dan dirangsang secara institusional penulisan buku-buku pelajaran dan buku-buku serta karya-karya ilmiah yang berpangkal tolak dari permasalahan-permasalahan Indonesia sendiri. Disinilah juga terletak suatu garis depan baru dalam pengembangan bahasa Indonesia seterusnya.

Adapun pertanyaan sampai dimana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana pendemokrasian masyarakat Indonesia, boleh dikatakan hasilnya positif bercampur negatif. Dari semula pergerakan nasional mencerminkan kerinduan bangsa Indonesia kepada kebebasan, kepada pelepasannya dari belenggu struktur-struktur sosial budaya tradisionalnya yang mengekang jiwa dan kemajuannya. Disinilah akar hasratnya akan kehidupan yang lebih demokratis. Dari semula sebutan "saudara", "bung" dan "(a)bang", dan kemudian "anda", merupakan lambang daripada unsur kerakyatan dan rasa samarata, atau "egaliterianisme", yang

menjadi cirinya pola demokrasi sederhana di dalam kehidupan pedesaan tradisional sebelum mulainya proses disintegrasinya. Masuknya kata sebutan "bapak", dan kata keterangan seperti "berkenan", mencerminkan suatu alam kehidupan berlapis-lapis atau berstratifikasi yang agak baru di dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan politik. Hal ini ada kaitannya dengan belum berhasilnya perjuangan bangsa untuk melepaskan diri dari sifat berlapis gandanya masyarakat Indonesia. Munculnya kata-kata itu dalam bahasa pergaulan maupun formal, mencerminkan bangkitnya kembali sikap jiwa feodal dalam bentuk modern, dan mempermudah berkembangnya kecenderungan neo-feodal itu dalam tubuh masyarakat dan kebudayaan kita. Kita juga dapat melihat gejala itu sebagai permulaan perkembangan bahasa Indonesia kearah perkembangan bahasa tinggi dan bahasa rendah yang dipakai untuk berbicara dengan pihak yang dianggap lebih tinggi, atau yang lebih rendah, atau dipakai secara campuran dalam percakapan dengan orang yang dianggap sederajat. Sudah barang tentu persoalan ini bukan suatu persoalan bahasa semata-mata. Pada hakekatnya dia merupakan persoalan sosial politik dan kebudayaan, yang memerlukan suatu kesepakatan nasional tentang sampai dimana kita menganggap stratifikasi sosial, warisan jaman feodal dan kolonial, sebagai sesuatu yang tidak dapat dan tidak perlu dirubah. Bagaimanapun juga, gejala ini menunjukkan betapa eratnya perkembangan bahasa dengan perkembangan masyarakat dan aspirasi-aspirasi sosial sesuatu bangsa.

Program Keluarga Berencana telah menunjukkan hasil-hasil sementara yang sangat menggembirakan. Namun, juga jikalau program itu nanti berhasil sepenuhnya, jumlah penduduk Indonesia tetap akan berlipat ganda dalam 25 tahun yang akan datang, yaitu dalam masa hidup generasi muda sekarang. Penampungan jumlah yang demikian besar ini

dan penampungan penambahan seterusnya, serta pemberantasan pengangguran dan kemiskinan akan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam masa yang akan datang. Struktur masyarakat yang kita warisi dari jaman feodal dan jaman kolonial, juga dalam bentuk yang lebih modern, tidak akan mampu menjawab tantangan ini. Akan diperlukan suatu transformasi sosial yang mampu mengatasi dualisme struktural yang menjadi ciri masyarakat kita sampai sekarang, guna menjamin kehidupan dan kerja yang layak bagi setiap warga Indonesia. Hal itu berarti suatu pembangunan kembali masyarakat Indonesia dari bawah, yang berpangkal tolak dari pengkairahan kembali kehidupan pedesaan, ketrampilannya, dan kemampuan berorganisasi serta kemampuan kreatifitasnya. Disamping itu, yang merupakan unsur kedua dalam usaha ini ialah, pengembangan golongan menengah yang besar lagi kuat, yang beraneka ragam kemampuan dan ketrampilan, serta tinggi produktifitasnya, dimana tenaga-tenaga non-pertanian dari daerah pedesaan maupun dari sektor informil perkotaan dapat mengambil tempat yang wajar. Perombakan struktur masyarakat ini tidak dapat dicetak dari atas, biarpun kebijaksanaan pemerintah merupakan suatu syarat mutlak dalam usaha ini. Ia terutama akan tergantung dari kemampuan dan motivasi swadaya masyarakat sendiri, khususnya ditingkat pedesaan dan sektor informil daerah perkotaan. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dapat memberi peluang, rangsangan serta bimbingan kepada pengembangan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga wadah kemampuan swadaya itu, dalam suatu kerangka kebijaksanaan-kebijaksanaan makro pada tingkat nasional yang mendukung usaha ini. Dalam pada itu tidak ada contoh atau model terperinci tertentu yang dapat ditiru atau dilaksanakan, karena yang pokok ialah dinamisasi masyarakat itu sendiri, sedangkan pada setiap

persimpangan jalan, dalam memilih antara jalan-jalan yang dapat ditempuh, kita hanya dapat berpegangan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai batu ujian tetap untuk rencana-rencana bersama kita. GBHN dan Repelita III, dengan penekanannya pada "terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya", telah membuka pintu kearah itu.

Di dalam perjuangan kita menghadapi demografi, pengangguran dan kemiskinan itu, serta dalam meneruskan perjuangan kita menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan terakhir tentang eksistensi manusia, yang jawaban-jawabannya merupakan essensi kebudayaan setiap bangsa, yaitu tentang maut, harapan, tragedi, kasih, keberanian, kekuasaan, makna dan tujuan hidup manusia serta hubungannya dengan sesama manusia, alam sekitarnya dan hubungannya dengan Tuhan. Di dalam penghadapan ini secara terus menerus, maupun di dalam penghadapannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan Indonesia akan memperbaharui dan mendefinisikan diri dari dalam.

Inilah pada hakekatnya proses kebudayaan yang sekarang kita alami, dan dimana kita masing-masing menjadi pelaku. Dari uraian di atas ini cukup jelas kiranya, bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar sarana komunikasi nasional bangsa Indonesia. Ia tetap merupakan alat perjuangan dalam usaha pembangunan kembali masyarakat Indonesia dari bawah, dan dalam penguasaan serta pengaslian ilmu dan teknologi sebagai sarana di dalam proses pembangunan tadi.

Kita telah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang perlu kita bina sebagai alat komunikasi dan alat perjuangan suatu

bangsa dan negara yang kuat, yang terdiri dari manusia bebas, dan yang hatinya tenang dalam kesadaran identitasnya sendiri dan kepercayaannya kepada kemampuan dan ketahanan kebudayaannya, karena terpeliharanya dan kreatifitas bahasa nasionalnya.

Maka pengembangan bahasa Indonesia seterusnya hendaknya diperhatikan dan diperlakukan sebagai suatu tantangan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah maupun masyarakat ramai. Kemudian, alangkah baiknya kalau disediakan dana dan daya yang secukupnya untuk memperkembangkan prasarana yang memadai untuk suatu kehidupan intelektual yang bergairah dan bermutu, yaitu dengan jalan memungkinkan peningkatan jumlah penerbitan sehingga keterbelakangan kita di bidang ini, dibandingkan dengan negara-negara yang lebih kecil dari kita di Asia Tenggara dan Selatan, dapat diatasi dalam waktu yang singkat. Dan alangkah baiknya pula, jikalau dilaksanakan tuntutan Konggres Nasional Bahasa Indonesia II untuk mengadakan suatu Jawatan Penterjemahan Negara yang cukup besar, baik dari bahasa asing - sehingga kita tidak ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang telah memilih bahasa Inggris sebagai wahana modernisasinya -, dan dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia - untuk memperkaya bahasa maupun kebudayaan Indonesia, dan untuk memperkuat persatuan bangsa.

Akhirnya patut agaknya untuk mempertimbangkan didirikannya suatu lembaga seperti "Academie Francaise" yang terdiri dari tokoh-tokoh senior bahasa, kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan tingkat nasional yang bertanggung jawab, dan mempertanggung jawabkan kepada seluruh bangsa Indonesia, penyempurnaan terus menerus suatu

Kamus Bahasa Nasional, termasuk kodifikasi istilah-istilah ilmu pengetahuan modern, kata-kata baru dan kata-kata yang mendapat makna baru yang diperkembangkan oleh dunia ilmu pengetahuan, dunia sastra, dunia media komunikasi dan kelompok-kelompok pergaulan tertentu di dalam masyarakat Indonesia. Lembaga semacam ini dapat bekerja berdasarkan persiapan dan pertimbangan-pertimbangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pilihan menjadi anggota hendaknya dianggap sebagai salah satu kehormatan nasional tertinggi yang dapat diberikan kepada seorang warga negara Indonesia.

Hari depan kita tergantung dari kesediaan kita untuk senantiasa memelihara dan memperbaiki mutu dan kemampuan alat perjuangan kita yang utama ini.

Mudah-mudahan kita diberi hikmah dan ketekunan untuk menunaikan tugas itu.

Jakarta, 24 Oktober 1978.

PENDUDUK INDONESIA

	<u>JAWA</u>	<u>LUAR JAWA</u>	<u>INDONESIA</u>
1930	41,7 juta	19,0 juta	60,7 juta
1950	50,5 juta	26,7 juta	77,2 juta
1955	55,7 juta	39,8 juta	83,5 juta
1961	63,0 juta	34,0 juta	97,0 juta
1971	76,4 juta	42,6 juta	119,0 juta
1976	83,6 juta	47,7 juta	131,3 juta
1981	91,2 juta	53,8 juta	145,0 juta
2001	122,0 juta	88,2 juta	210,2 juta

PENDUDUK INDONESIADESA DAN KOTA

(%)

	<u>K O T A</u>	<u>D E S A</u>
1961	15	85
1971	17	83
1976	19	81

Table 1.2: GROWTH OF CITIES
(Having 100,000 or More Population in 1961)

Province	City	Population in Thousands		Annual Rate of Growth 1961-71 (Percent)
		1961	1971	
Jakarta	Jakarta	2,973	4,576	4.41
E. Java	Surabaya	1,008	1,556	4.44
W. Java	Bandung	973	1,200	2.12
C. Java	Semarang	503	647	2.55
N. Sumatra	Medan	479	634	2.84
S. Sumatra	Palembang	475	583	2.07
S. Sulawesi	Ujung Pandang	384	425	1.02
C. Java	Surakarta	368	414	1.18
E. Java	Malang	341	422	2.15
Jogjakarta	Jogjakarta	313	342	0.89
S. Kalimantan	Banjarmasin	214	282	2.79
E. Java	Kediri	159	179	1.19
W. Java	Cirebon	158	179	1.26
W. Java	Bogor	154	195	2.39
W. Kalimantan	Pontianak	150	218	3.81
W. Sumatra	Padang	144	196	3.13
Lampung	Telukbetung	133	199	4.11
N. Sulawesi	Menado	130	170	2.72
W. Java	Tasikmalaya	126	136	0.77
E. Java	Madiun	123	136	1.01
N. Sumatra	Pematangsiantar	115	129	1.16
Jambi	Jambi	113	158	3.41
C. Java	Pekalongan	102	111	0.85
Total		9,638	13,087	3.11

Source: Population Census, 1961 and 1971.

KEPADATAN PENDUDUKorang per km²

	<u>JAWA</u>	<u>LUAR JAWA</u>	<u>INDONESIA</u>
1930	316,1	10,7	31,9
1950	382	15,1	40,5
1961	476,6	19,2	50,9
1971	578,0	24,0	62,5
1981	690,0	30,4	76,1
2001	923,0	50,0	110,4

JUMLAH SISWA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

<u>Tingkat</u>	<u>T a h u n</u>		
	<u>1935</u>	<u>1940</u>	<u>1975</u>
SD	1.786.539	2.200.517	14.280.157
SL	36.011	63.053	2.695.577
Univ.	984	1.246	134.500

Sumber :

1. M. Hutasoit, Compulsory Education in Indonesia
UNESCO, Paris, 1954
2. Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan Dalam Alam
Indonesia Merdeka, Gunung Agung,
Jakarta, 1970
3. Statistik Indonesia 1976, BPS, Jakarta

Table 1.1. : POPULATION DISTRIBUTION AND GROWTH : URBAN, RURAL, TOTAL IN JAVA AND OTHER ISLANDS, 1961-1976

	Population Distribution			Average Annual Rate of Growth		
	Census Oct. 1961	Census Sept. 1971 percent	Survey Mar. 1976	1961/'71	1971/'76 percent	1961/'76
<u>JAVA</u>	64.9	63.8	63.0	1.9	1.7	1.8
Urban	(15.6)	(18.0)	(18.1)	3.4	1.8	2.9
Rural	(84.4)	(82.0)	(81.9)	1.6	1.7	1.6
<u>OTHER ISLANDS</u>	35.1	36.2	37.0	2.4	2.5	2.4
Urban	(13.4)	(16.3)	(17.5)	4.5	4.1	4.4
Rural	(86.6)	(83.7)	(82.5)	2.0	2.1	2.1
<u>TOTAL</u>	100.0	100.0	100.0	2.1	2.0	2.1
Urban	(14.8)	(17.4)	(17.9)	3.8	2.6	3.4
Rural	(85.2)	(82.6)	(82.1)	1.8	1.8	1.8

Source : Calculated from Appendix A-4 and A-5

Data UNESCO mengenai penerbitan buku di
kawasan Asia tahun 1970

<u>Negara</u>	<u>Judul</u>
Birma	2127
Srilangka	1566
I r a n	1381
Korea Selatan	4207
Muangthai	2085
Indonesia	700

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, no.9, 1977. Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa-Tengah). Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Aveling, Harry, 1976. Arjuna in Meditation : Three Young Indonesian Foets, Translated by Harry Aveling, Calcutta 700045, India : P. Lal from 162/92, Lake Gardens.
- Alisjahbana, S. Takdir, 1965. The Failure of Modern Linguistics in the face of linguistic problems of the twentieth century. Kuala Lumpur : University of Malaya.
- Abdullah, Taufik dan Lopian, Adrian Bernard, 1971 Proceedings Southeast Asian Regional Conference on the Study of Malay Culture. Jakarta : Indonesian National Commission for Unesco, Department of Education and Culture.
- Attali, Jacques. 1975. La Parole et L'outil, Economie en Liberté. France : Presses Universitaires de France.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1974. Symposium Bahasa dan Hukum. Medan, Prapat.
- Bodenstedt, Adolf Andreas, 1966. Sprache Und Politik In Indonesien, Entwicklung Und Funktionen Einer Neuen National-sprache. Münster : Universität Münster.
- Burger, DH, 1975. Sociologisch - Economische Geschiedenis van Indonesia, deel I, Indonesia voor de 20^e eeuw. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen.
- Burger, DH. 1975. Sociologisch - Economische Geschiedenis van Indonesia, deel II, Indonesia in de 20^e eeuw. Amsterdam : Koninklijk Instituut voor de Tropen.
- Clammer, John R, D.Phil. 1976. Sociological Approaches to the Study of Language and Literacy in Southeast Asia. Singapore : Chopmen Enterprises.
- Djawatan Kebudayaan Kem. P.P. dan K., Bagian Bahasa. 1955. Kongres Bahasa Indonesia, Di Kota Medan 28 Okt.- 2 Nov. 1954. Djakarta.

- Feith, Herbert dan Casties, Lance. 1970. Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Halim, Amran. 1976. Politik Bahasa Nasional 1. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halim, Amran. 1976. Politik Bahasa Nasional 2. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hartig, Matthias/Kurz, Ursula. 1971. Sprache als Soziale Kontrolle, Neue Ansätze zur Soziolinguistik. Nördlingen : Georg Wagner.
- Hagen, Everett E, PH.D. 1962. On the Theory of Social Change. How Economic Growth Begins. Homewood, Illinois : The Dorsey Press, Inc.
- Jassin, H.B.,Dr.; K.M., Saini; Jt, Darmanto. 1976. Penyair Muda di Depan Forum. Jakarta : Dewan Kesenian Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, Prof. The Impact of Science and Technology on Societies in Southeast Asia. Yogyakarta : Kertas Kerja.
- Kartodirdjo, Sartono, Prof.; Poesponegoro, Marwati Djoened; Notosusanto, Nugroho. 1975. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kahin, George Mc. Turnan. 1962. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York : Cornell University Press.
- Lyons, John. 1977. Chomsky. Great Britain : William Collins Sons and Co. Ltd. Glasgow.
- Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS-LIPI) bekerjasama dengan Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan. 1976-1977. Sejarah Pers di Indonesia. Sumber dan Hasil Penelitian Awal. Jakarta : Departemen Penerangan dan LIPI.
- Noss, Richard B. 1978. Some Southeast Asian Priorities in Applied Linguistics. Paper.
- Nurcombe, Barry. 1976. Children of the Dispossessed. Hawaii : The University Press of Hawaii.

- Penerbit Djambatan. 1955. Kongres Bahasa Indonesia di Medan.
Peristiwa yang tiada bandingannya. Jakarta
- Rosidi, Ajip. 1973. Pembinaan Minat Baca, Apresiasi dan Penelitian Sastra. Jakarta : Panitia Tahun Buku Internasional DKI Jakarta.
- Rosidi, Ajip. 1976. Ihktisar Sejarah Sastra Indonesia.
Bandung : Binacipta.
- Reid, Anthony. 1974. The Indonesian National Revolution 1945-1950.
Australia : Longman.
- Suryomihardjo, Abdurrachman, Drs. 1974. Sumpah Pemuda di Dalam Perkembangan Budaya-Politik Indonesia 1900-1945, sebuah ihktisar, dari 45 tahun Sumpah Pemuda. Jakarta : Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah.
- Steinmetz. 1912. Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera, Deel II : Slotbeschouwingen (Eerste Gedeelte). Batavia : G. Kolff & Co.
- Steinmetz. 1911. Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madoera, Deel I : Eigenlijk Oversight, Van De Samentrekkingen der Afdeelingsverslagen (1904-1906). Batavia : G. Kolff & Co.
- Ta-Sen., Tan, Drs. 1978. Language Policies in Insular Southeast Asia : A Comparative Study. Singapore : Chopmen Enterprises.
- Unesco. 1974. Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Asia. Yogyakarta 10-19 December 1973. Final Report.
Paris : Unesco.
- Unesco. 1976. Experts' Meeting on the International Thesaurus on Cultural Development. Paris : Unesco.
- Van der Wal, S.L., Dr. 1965. Het Maleis In De Volksraad. dari De Volksraad En De Staatkundige Ontwikkeling Van Nederlands Indië.
Groningan : J.B. Wolters.
- Yamin, Muhammad, Mr. 1954. Pidato Penutup Kongres Bahasa Indonesia.
Jakarta : Balai Pustaka.
- Loehoer W.D.; Kana N.L.; Samiana, I Made; Kutut S. 1978. Gejala Migrasi Dipandang Dari Tempat Asal dan Dari Tempat Tujuan. Dalam majalah "CAKRAWALA", no.4 th. X, 1978 (majalah penelitian sosial. Salatiga : LPIS, Universitas Kristen Satya Wacana.